BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan program dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) penting dilakukan karena untuk mengkoreksi penyelenggaraan Program BOS Kota Bandung hasildi tahun-tahun sebelumnya, sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan BOS berikutnya. Dengan demikian pemerintah bisa memperbaiki kinerja danbisa mengambil keputusanyang baik untuk mendukung program penyelenggaraan dana BOS pada tahun-tahun berikutnyasupaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Regulasi yang menjadi latar belakang program BOS diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui dana BOS Kota yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai langkah nyata pemerintah dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar sekaligus sebagai upaya penuntasan target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sebagai wujud fokus Pemerintah Kota Bandung untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu maka sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SMP baik negeri maupun swasta.

Program BOS Kota Bandung yang dimulai sejak tahun 2009, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai Tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kebijakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu supaya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan kedepannya jauh lebih baik lagi. Kewajiban bagi pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi program BOS Kota ini supaya jangan sampai ada penyalahgunaan yang terjadi dalam proses penyaluran dana BOS di masa yang akan datang dan tidak ada lagi keterlambatan penyaluran dana BOS akibat keterlambatan. Program pemerintah seharusnya direncanakan dengan matang tetapi walau bagaimanapun kekurangan itu selalu ada. Tujuan dari evaluasi program dana BOS Kota Bandung tidak terlepas dari peran serta pemerintah kota, dinas pendidikan dan juga sekolah dalam penelitian ini yaitu SMPN 29 Kota Bandung yang secara langsung menerima dana BOS.Unsur-unsur tersebut yang menjadi fokus evaluasi kebijakan program BOS Kota Bandung agar

kekurangan dalam hal teknis atau operasional dapat dikurangi sebagai bahan evaluasi bersama.

Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendahara SMPN 29 Kota Bandung. Isi laporan pertanggungjawaban itu mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan penggunaan anggaran BOS di sekolah dibuat dalam dua periode yaitu laporan bulanan dan laporan triwulan.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yaitu dengan adanya komite sekolah. Komite sekolah disini bertindak sebagai pengawas jalannya penyaluran dana BOS di SMPN 29 Kota Bandung.

4.1 Efektivitas Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Efektivitas menurut Dunn yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa tindakan merupakan kebijakan yangdibuat pemerintah Kota Bandung dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu apabila setelah pelaksanaan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah dihadapi masyarakat

maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal. Suatu kebijakan publik juga bisa mengalami ketidakefektivan dalam jangka pendek disebabkan karena beberapa faktor diantaranya evaluasi yang dilakukan tidak optimal dan detail.

Ada beberapa orang tua siswa yang peneliti wawancarai merasa menyekolahkan anak sebagai kebutuhan yang mahal karena sekolah bukanlah semata-mata mengeluarkan uang untuk kebutuhan operasional anaknya tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain di luar kebutuhan operasional sekolah yang harus dikeluarkan walaupun tidak dipungkiri bahwa dengan adanya program BOS Kota Bandung akses masyarakat menengah ke bawah lebih terjangkau terhadap pendidikan.

Anggaran dana BOS Kota Bandung yaitu RP. 710.000/siswa sedangkan siswa di SMPN 29 Kota Bandung berdasarkan data yang diterima peneliti yaitu sebanyak 1.200 siswa. Anggaran yang ada digunakan untuk kebutuhan yang oleh buku pedoman BOS dialokasikan untuk tiga belas bidang yang masing-masing memiliki sub bidang. Pada data rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS APBD terdapat penjelasan mengenai pembelian buku teks pelajaran sebesar 5%. Menurut hasil analisa peneliti bahwa anggaran yang dikeluarkan sebesar 5% sudah cukup untuk keperluan pembelian buku teks pelajaran. Data tersebut dapat dilihat pada halaman ***54 poin A***. Itu artinya bahwa alokasi anggaran untuk keperluan buku teks pelajaran sudah efektif karena buku teks pelajaran mendapat dana bantuan dari BOS pusat. Jadi sangat dimungkinkan untuk kebutuhan anggaran sebesar 5% sudah cukup.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 membahas mengenai hak dan kewajiban orang tua siswa untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Undang-Undang tersebut dengan tegas mengamanatkan bagi orang tua yang memiliki anak wajib belajar harus menyekolahkan anaknya. Pada pasal 6 ayat 1 dibahas bahwa "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Undang-undang tersebut yang dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Bandung.

Menurut analisa peneliti bahwa itulah letak efektivitas Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung bukan hanya semata-mata bantuan secara finansial tetapi makna dana BOS itu sendiri yaitu memajukan kualitas pendidikan siswa-siswi yang ada di SMPN 29 Kota Bandung. Hal tersebut belum begitu terlihat sepenuhnya.

Efektivitas dana BOS ini juga berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena pemerintah Kota Bandung juga harus bisa membedakan alokasi dana BOS ini yang disebabkan oleh suatu kondisi demografi sekolah-sekolah yang masuk ke dalam sekolah penerima dana BOS. Karena setiap sekolah memiliki kondisi demografi yang berbeda karena dengan kondisi demografi yang berbeda akan mempengaruhi efektivitas dana BOS itu sendiri. Contohnya, SMP yang berada di pelosok kebutuhannya berbeda dengan SMP yang berada di tengah-tengah kota. Mungkin alokasi dana operasional yang dibutuhkan SMP yang berada di pelosok desa jauh lebih besar daripada SMP yang berada di tengah-tengah kota. Hal tersebut disebabkan karena fasilitas SMP yang berada di pelosok masih minim, jarak tempuh ke sekolah masih menemui hambatan seperti

harus melewati sungai, sawah atau bahkan hutan karena sarana transportasi belum terjangkau.

Selanjutnya yaitu masalah tim manajemen sekolah dalam program dana BOS di Kota Bandung ini juga merupakan faktor penting bagi proses evaluasi kebijakan BOS Kota Bandung. Manajemen sekolah lah yang tahu kebutuhan para siswa-siswi di SMPN 29 Kota Bandung. Sudah sangat jelas bahwa penyaluran dana BOS berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMPN 29 Kota Bandung bahwa: *"Proses penyaluran dana BOS ini pertama dari Walikota kemudian dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah itu baru ke sekolah, yang diberikan dalam bentuk cek"*(13 Juni 2013).

Itu berarti bahwa peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS juga menjadi unsur program BOS ini efektif atau tidak. Dengan adanya peran kepala sekolah yang begitu penting. Peran kepala sekolah tersebut diantaranya mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah pembiayaan dimana pembiayaan ini dapat disebut sebagai fungsi penganggaran. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan keuangan untuk rencana kegiatan atas sepengetahuan dan keterlibatan komite sekolah sebagai wujud keterbukaan pelayanan pendidikan.

Bahwa telah diketahui posisi kepala sekolah sejajar dengan komite sekolah untuk bersama-sama melakukan fungsi *check and balance* dalam membuat rancangan anggaran dana BOS. Rancangan anggaran tersebut meliputi 12 bidang yang sesuai dengan buku panduan BOS. Apabila ke-12 bidang tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan program BOS itu berarti menyalahi aturan yang ada.

Ada yang dinamakan Rancangan Anggaran dan Pembiayaan Sekolah (RAPBS) yang mendasari pelaksanaan dari suatu kegiatan yang akan di realisasikan pihak sekolah dalam satu periode. Dengan RAPBS tersebut maka suatu kegiatan yang diselenggarakan dapat dievaluasi secara transparan dan akuntabel.

Ada beberapa hal yang harus dikritisi yaitu mengenai RAPBS yang dibuat oleh tim manajemen BOS atas sepengetahuan kepala sekolah, komite sekolah dan bagian tata usaha SMPN 29 Kota Bandung. Pada poin ***J*** halaman 57 dimana tercantum mengenai hal transport bagi siswa miskin dianggarkan sebesar 0%. Dari keterangan tersebut BOS masih belum difokuskan untuk menarik siswa untuk pergi ke sekolah. Seperti yang diketahui alokasi dana BOS belum sepenuhnya difokuskan untuk kepentingan siswa. Hal tersebut mengarah pada peran komite sekolah belum maksimal.

Hal yang selanjutnya harus diperhatikan yaitu fungsi pengawasan terhadap peran kepala sekolah yang dalam hal tersebut begitu memiliki kewenangan yang besar dalam pemanfaatan dana BOS kota yang diberikan pemerintah Kota Bandung terhadap SMPN 29. Komite sekolah yang bertangggung jawab dalam hal pengawasan terhadap peran kepala sekolah yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan dana BOS. Tidak banyak dana BOS menjadi sasaran bagi oknum-oknum tertentu untuk disalahgunakan.

Permasalahan yang ada apakah kemudian peran komite sekolah SMPN 29 Kota Bandung ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pengawasan. Apabila komite sekolah bertanggung jawab terhadap kepala sekolah. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme yang saat ini diberlakukan oleh

komite sekolah dan kepala sekolah belum efektif karena RAPBS yang dibuat SMPN 29 masih terlihat belum maksimal dipergunakan untuk kepentingan siswa dimana ada salah satu aspek yang masih belum dialokasikan dengan maksimal dengan jumlah 0%.

4.1.1 ProsesProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Apabila dikaitkan dengan teori Dunn, efektivitas ini terdiri dari dua indikator yaitu proses dan kepuasan. Proses dalam hal ini yaitu alur, cara yang digunakan Pemerintah Kota Bandung dalam hal penyaluran dana BOS kepada SMPN 29 Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TU SMPN 29, sebagai berikut:

> "Mekanismeyaitu dari Walikota Bandung kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung kemudian dana tersebut dialirkan melalui sekolah-sekolah penerima dana BOS dalam bentuk cek yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kemudian disalurkan kepada siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung" (13 Juni 2013).

Sebenarnya dalam hal proses mekanisme penyaluran dana BOS seperti pernyataan yang dikemukakan kepala TU SMPN 29 Kota Bandung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa tidak menyalahi aturan. Ada beberapa mekanisme penyaluran dana BOS yang dilakukan pemerintah pusat sebagai pelopor pelaksanaan program BOS secara nasional.

Hal pokok lainnya yaitu dalam penyelenggaraan proses Dana BOS Kota Bandung yaitu berupa bimbingan teknis yang diselenggarakan Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mensosialisasikan penyaluran dana BOS itu seperti apa yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah kota dan

penerimaan yang mengelola dana BOS itu harus digunakan untuk apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah yang membutuhkan dana BOS. Pemerintah kota yang merealisasikan hasil bimbingan teknis.

Bila dikaji lagi, mengenai proses penyaluran dana BOS Kota Bandung apabila dikaitkan dengan proses evaluasi kebijakan penyaluran dana BOS Kota Bandung memiliki korelasi. Karena proses ini merupakan bagian dari seberapa efektifnya program BOS yang telah diimplementasikan selama kurang lebih 4 tahun berjalan.

Kurun waktu empat tahun program BOS Kota Bandungdiimplementasikan tidak banyak terjadi perubahan. Mekanisme yang digunakan pemerintah Kota Bandung dalam penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah tetap melalui dinas pendidikan Kota Bandung baru kemudian diberikan legalisasi dalam bentuk cek kepada sekolah penerima setelah itu BOS baru dapat dicairkan.

Pemerintah Kota Bandung sebaiknya membuat suatu komite yang tujuannya untuk pengawasan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS. Tujuannya agar mekanisme yang digunakan selama ini efektif yaitu digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan operasional para siswa.

Proses penyaluran dana BOS Kota Bandung disesuaikan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu berbentuk Peraturan Walikota Bandung yang harus di laksanakan sesuai kebijakan tersebut. Hal yang pertama kali dilaksanakan sekolah harus mengajukan surat pertanggungan jawaban (SPJ) kepada pemerintah daerah apa saja yang di butuhkan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dalam mendukung sarana dan prasarana sekolah.

Supaya pelaksanaan proses pembelajaran bisa terselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses yang harus dilalui dalam menerima dan pengeluaran untuk keperluan sekolah pihak sekolah harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandungsupaya tidak ada penyimpangan dalam melaksanakan penyaluran kepada siswa SMPN 29 Kota Bandung. BOS Kota Bandung ini disalurkan untuk pembelian buku teks pelajaran, kegiatan penerimaan peserta didik baru, kegiatan belanja ekstrakulikuler, kegiatan ulangan dan iuran, pembelian alat habis pakai, langganan daya dan jasa, biaya perawatan dan pemeliharaan, pembayaran honor guru dan pegawai honorer, pengembangan profesi guru, bantuan transport siswa miskin, pengelola BOS, pembelian komputer dan printer serta lain-lain.

Proses penyaluran dana BOS tersebut harus mencakup ketiga belas bidang tersebut dimana masing-masing memiliki sub bidang-sub bidang. Kemudian rencana penggunaan dana BOS tersebut dirapatkan bersama-sama dengan kepala sekolah, komite sekolah dan bagian tata usaha untuk disusun rekapitulasi penganggaran setelah itu disahkan oleh kepala sekolah.

Jadi, proses penyaluran dana BOS cukup baik Proses penyaluran dana BOS Kota Bandung disesuaikan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu berbentuk Peraturan Walikota Bandung yang harus di laksanakan sesuai kebijakan tersebut dengan mengajukan surat pertanggungan jawaban (SPJ) oleh sekolah.

4.1.2 KepuasanProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Kepuasan merupakan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi untuk mewujudkan prioritas dalam program dana BOS yang harus diberikan sekolah yang membutuhkan bantuan untuk sekolah. Kepuasan adalah hasil kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan indikator kepuasan yaitu masih kurang puas bagi orang tua siswa karena dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Tata Usaha SMPN 29 Kota Bandung bahwa:

> " Tidak ada perbedaan besaran jumlah yang diberikan antara siswa kaya dan siswa miskin. Dana BOS yang diberikan Pemerintah Kota Bandung untuk sekolah-sekolah yang ada Di Bandung termasuk SMPN 29 Kota Bandung"
> (13 Juni 2013).

Menurut pendapat peneliti hal tersebut kurang efektif karena apabila dilihat siswa yang kaya dan yang berasal dari keluarga kurang mampu nilai kebutuhannya berbeda. Oleh sebab itu peneliti menyatakan hal tersebut kurang efektif karena cenderung dana BOS tersebut kurang efektif apabila siswa yang berlatar belakang dari keluarga ekonomi menengah-kebawah akan sangat keberatan.

Adanya dana yang telah di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada SMPN 29 bisa dikelola dengan mengatur apa saja yang diperlukan untuk dana kebutuhan operasional sekolah, mungkin seperti membeli peralatan keperluan sekolah, alat tulis, untuk membayar gaji honorer. Hal ini yang menjadikan indikator kepuasan ini bukan hanya dirasakan oleh guru dan siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung tapi juga harus dirasakan oleh orang tua siswa. Mungkin orang

tua siswa yang tidak mampu merasa senang dengan adanya dana BOS Kota Bandung.

Berkaitan dengan indikator kepuasan, peneliti juga mengadakan wawancara dengan siswi yang sekolah di SMPN 29 Kota Bandung, saat peneliti menanyakan berkaitan dengan indikator kepuasan kepada dua orang siswi tersebut, yaitu:

> "Bahwa mereka menyatakan puas dengan adanya bantuan dari pemerintah Kota Bandung berupa dana BOS karena tidak ada lagi uang SPP setiap bulan dan tidak harus membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) karena saat ini ada buku BOS yang dipinjamkan kepada siswa" (14 Juni 2013).

Dari pernyataan tersebut ada suatu keyakinan positif dari sudut pandang seorang siswa yang bersekolah di SMPN 29 Kota Bandung bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya program BOS Kota Bandung. Dan kedua siswi tersebut memberikan respon positif terhadap program pemerintah kota tersebut.

Saat peneliti ingin menggali mengenai masalah yang berhubungan dengan kepuasan yang sebelumnya telah dibahas, yaitu tidak ada perbedaan antara siswa kaya dan siswa miskin. Kedua siswi yang kami wawancarai memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "Bahwa di SMPN 29 Kota Bandung bagi siswa yang kaya tidak mendapatkan seragam gratis, mereka harus membeli ke sekolah, sedangkan bagi siswa yang kurang mampu seragam tersebut diberikan secara cuma-cuma" (14 Juni 2013).

Dari pernyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa disitulah nilai kepuasan dapat dilihat bahwa masing-masing sekolah memiliki kebijakannya masing-masing. Jangan sampai dana BOS tidak menjangkau sama sekali siswa-siswa yang sebenarnya lebih membutuhkannya.

Saat peneliti ingin menggali mengenai masalah yang berhubungan dengan kepuasan yang sebelumnya telah dibahas, yaitu tidak ada perbedaan antara siswa kaya dan siswa miskin.

Kedua siswi yang kami wawancarai memberikan pernyataan sebagai berikut:

> “Bahwa di SMPN 29 Kota Bandung bagi siswa yang kaya tidak mendapatkan seragam gratis, mereka harus membeli ke sekolah, sedangkan bagi siswa yang kurang mampu seragam tersebut diberikan secara cuma-cuma” (14 Juni 2013).

Dari pernyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa disitulah nilai kepuasan dapat dilihat bahwa masing-masing sekolah memiliki kebijakannya masing-masing. Jangan sampai dana BOS tidak menjangkau sama sekali siswa-siswa yang sebenarnya lebih membutuhkannya.

Adanya kebijakan seperti itu di SMPN 29, peneliti merasa itu sudah cukup baik dan nilai efektivitasnya jauh dapat dirasakan siswa yang memang masuk dalam kategori siswa yang kurang mampu. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan seperti itu seharusnya pendidikan bisa menjangkau semua masyarakat.

Hanya saja saat ini pendidikan yang sepenuhnya gratis belum terealisasikan. BOS merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan membantu siswa dalam hal pembiayaan yang berhubungan dengan biaya operasional. Disisi lain banyak kegiatan-kegiatan siswa yang harus mewajibkan orang tua siswa untuk mengeluarkan sejumlah biaya seperti biaya untuk kegiatan ekstrakulikuler olahraga renang yang setiap bulan siswa diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan renang.

Menurut peneliti kesimpulannya bahwa BOS belum cukup menjawab permasalahan orang tua siswa yang memiliki latar belakang ekonomi menengah-ke bawah untuk merasakan pendidikan yang berkualitas. Pada kenyataannya masih banyak kebutuhan siswa di luar kegiatan sekolah seperti kegiatan ekstrakulikuler yang belum dimasukkan ke dalam rencana anggaran BOS.

Jadi, indikator kepuasan ini cukup baik karena respon positif yang diberikan masyarakat yaitu siswa dan orang tua siswa yang merasa terbantu dengan adanya program BOS. Adanya program BOS Kota telah memberikan keringanan bagi orang tua siswa.

4.2 EfisiensiProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator yang kedua, Menurut Dunn yaitu efisiensi yaitu berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari definisi tersebut bahwa yang terjadi di lapangan yaitu apakah dana BOS ini digunakan memang hanya untuk kebutuhan operasional siswa atau ada penyalahgunaan dana yang semula dana BOS ini untuk membantu dan menunjang kebutuhan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing siswa dalam berprestasi tetapi pada praktiknya RAPBS belum diimplementasikan secara optimal.

Pada RAPBS Rekapitulasi pengeluaran dana BOS mencakup 12 bidang. Ada beberapa bidang yang mendapat alokasi anggaran besar seperti honor guru dialokasikan sebesar 20%. Hal tersebut menjadi tidak efisien apabila kualitas pendidikan di SMPN 29 tidak ditingkatkan untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Fakta yang sering terjadi adalah tuntutan kenaikan honor

guru yang tidak dibarengi prestasi guru. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengembangan profesi guru yang hanya dialokasikan sebesar 4%.

Pengembangan profesi guru ini sangat penting karena ada pelatihan-pelatihan khusus bagi guru untuk menunjang *skills* para guru tersebut. Tetapi dialokasikan lebih kecil daripada alokasi untuk honor guru.Pembelian buku dianggarkan sebesar 5% untuk membeli buku pelajaran. Masih harus dikurangi karena buku paket mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Dalam RAPBS penggunaan dana BOS Kota Bandung belum dirinci mengenai jenis-jenis buku apa saja yang akan dibeli.

Kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) merupakan bagian dari ketiga belas bidang yang harus dimasukkan ke dalam rancangan anggaran BOS Kota Bandung. Melihat dari data-data yang diperoleh peneliti bahwa kegiatan PPDB ini dialokasikan untuk kebutuhan belanja alat tulis, makan-minum kegiatan, transport kegiatan, honor panitia PPDB. Peneliti rasa alokasi sebesar 1,5% sudah cukup. Mengingat dalam kegiatan penerimaan siswa baru itu membutuhkan susunan kepanitiaan yang membutuhkan biaya-biaya operasional salah satunya honor panitia PPDB. Data tersebut dapat dilihat pada halaman ***54 poin B***. Jadi sangat dimungkinkan alokasi sebesar 1,5% digunakan seefisien mungkin.

Menurut peneliti bahwa perlu diadakan sosialisasi mengenai kegunaan dana BOS ini sebelum dan sesudah dana BOS itu cair. Maksudnya adalah ada kontrol yang dilakukan dinas pendidikan dan sekolah penerima dana BOS agar dana BOS ini benar-benar mencapai titik efisien.

Hal tersebut berhubungan dengan sikap dan nilai yang ada pada setiap individu untuk menggunakan dana BOS ini dengan bijaksana. Caranya yaitu dilakukannya sosialisasi terhadap orang tua siswa agar memahami tujuan dana BOS ini diberikan pada siswa. Komite sekolah dalam hal ini harus berperan aktif sehingga masyarakat dapat percaya bahwa program BOS ini orientasi terbesarnya yaitu kepentingan siswa.

Perlu ditekankan lagi bahwa definisi efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Definisi efisiensi tersebut memberikan penekanan pada suatu cara yang digunakan Pemerintah Kota Bandung supaya program bantuan BOS ini berhasil. Maka hal yang berkaitan dengan keberhasilan suatu program tersebut diantaranya mekanisme atau cara. Saat ini cara yang digunakan Pemerintah Kota Bandung dalam penyaluran dana BOS yaitu dengan menggunakan cek yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung kemudian baru disalurkan kepada sekolah-sekolah penerima dana BOS untuk kebutuhan operasional sekolah.

Peneliti merasa kurang setuju untuk penggunaan cek dalam mekanisme penyaluran dana BOS Kota Bandung. Hal tersebut rentan terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Mekanisme cek mengakibatkan ketidaktransparan jumlah yang diterima masing-masing sekolah penerima dana BOS.

Peneliti juga menilai bahwa pemerintah belum menjelaskan dengan terperinci mengenai kriteria sekolah penerima dana BOS. Menurut hasil pengamatan peneliti, dana BOS Kota Bandung itu disalurkan ke semua sekolah yang ada di Kota Bandung baik negeri atau swasta dari tingkat SD dan SMP. Permasalahannya yaitu apabila ada sekolah yang benar-benar kondisinya memprihatinkan jumlah dana yang diterima sama dengan sekolah lainnya yang aksesnya mudah, lokasinya di tengah-tengah kota, sarana dan prasarananya lengkap.

Peneliti menyimpulkan hal tersebut masih belum efisien karena dengan berbagai latar belakang kebutuhan yang berbeda besaran yang diterima sekolah satu dengan sekolah lainnya disamaratakan. Pemerintah harus bisa melihat kondisi masing-masing sekolah yang berbeda dari letak geografis, keadaan demografi, dan kebutuhan para siswa.

Dari hasil wawancara kepala TU SMPN 29,efisiensi itu sangat minim sekali karena dana yang diterima tidak bisa mencukupi kebutuhan siswa sebanyak 1.200 siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung. Dalam hal ini sekolah harus mengunakan dana tersebut seirit mungkin, dengan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Bandung kepada sekolah harus di gunakan sehemat mungkin dan dalam hal ini tambahan untuk memenuhi keperluan sekolah dibantu juga dari BOS pusat dan BOS provinsi jadi sekolah bisa memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan.

Jadi, mengenai indikator efisiensi ini masih kurang efisien karena masih ada ketidaksesuaian pembagian alokasi ke beberapa bidang seperti RAPBS alokasi terhadap honor guru lebih besar daripada pengembangan profesi guru

yang menurut peneliti pengembangan profesi guru penting dan membutuhkan alokasi lebih dari 4% untuk meningkatkan *skills* guru yang berdampak pada proses belajar yang berkualitas kepada para siswa.

4.2.1 Tenaga Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Sementara itu indikator efisiensi memiliki dua *middle* teori yaitu tenaga dan biaya. Definisi tenaga yaitu seseorang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan memiliki keahlian dalam bidang penyelenggaraan dana BOS. Menurut peneliti indikator tenaga ini sangat mempengaruhi kesuksesan program dana BOS di SMPN 29 Kota Bandung.

Apabila ditelaah menurut hasil wawancara dengan kepala TU SMPN 29 Kota Bandung bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk penyaluran dana BOS itu membutuhkan tenaga yang sangat banyak untuk mengevaluasi program dana BOS karena SMP penerima dana BOS Kota Bandung itu tidak hanya SMPN 29 tetapi SMP-SMP yang ada di Kota Bandung baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, sebenarnya tenaga yang dibutuhkan sangat banyak. Namun, yang terjadi di lapangan yaitu hanya ada pengawas dari bagian tata usaha (TU) dan dari dinas pendidikan yang masih sedikit.

Penyaluran dana BOS dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang pelaksanaan dana BOS. Dengan banyaknya jumlah sekolah yang menerima dana BOS Kota Bandung, pemerintah daerah masih kekurangan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dibidang pelaksanaan BOS Kota Bandung. Dan dinas keuangan mempunyai ruang yang kecil dan tidak semua aparatur yang

berada dinas keuangan bisa melaksanakan penyaluran dana BOS yang diterima oleh pemerintah daerah dan akan disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menerima dana BOS.

Namun dengan adanya keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung penyaluran dana BOS Kota Bandung bisa terealisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bandung.

Hasil di lapangan bahwa tenaga kerja atau guru yang mengajar di SMPN 29 Kota Bandung dari 58 pegawai 47 pegawai sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mereka memang mempunyai keahlian di bidang pendidikan karena hampir semua PNS disana mempunyai gelar sarjana pendidikan. Jika dilihat dari kualitas guru yang dimiliki SMPN 29 Kota Bandung sudah memenuhi standar yang berlaku untuk disetiap daerah.

Berdasarkan data yang diterima peneliti bahwa terdapat 58 guru 11 diantaranya guru honorer. Mengingat dalam pelaksanaan pendidikan peran guru itu sangat penting sehingga kualitas guru harus ditingkatkan salah satunya dari ketiga belas bidang yang harus ada dalam pengalokasian dana BOS terdapat pada ***poin H. Poin H*** ini yaitu bidang pembayaran honor guru dan pegawai honorer. SMPN 29 Kota Bandung masih memiliki guru honorer sebanyak 11 orang, menurut peneliti jumlah tersebut masih cukup banyak sehingga membutuhkan perhatian penting dari pemerintah dan pihak sekolah untuk mengalokasikan dana BOS Kota ini bagi peningkatan mutu dan kualitas guru honorer yang tugas dan fungsinya sama dengan guru PNS.

Hasil di lapangan bahwa tenaga kerja atau guru yang mengajar di SMPN 29 Kota Bandung dari 58 pegawai 47 pegawai sudah menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) mereka memang mempunyai keahlian di bidang pendidikan karena hampir semua PNS disana mempunyai gelar sarjana pendidikan. Jika dilihat dari kualitas guru yang dimiliki SMPN 29 Kota Bandung sudah memenuhi standar yang berlaku untuk disetiap daerah.

Perlunya dilakukan evaluasi dalam bidang sumber daya manusia yang membidangi proses penyaluran BOS, pemerintahharus membuat kebijakan yang membuat yang lebih singkat dan efektif, supaya semuanya bisa berjalan lebih efektif dan mempermudah pekerjaan supaya tidak memakan waktu yang sangat lama. Setelah dilakukan evaluasi masih kurangnya aparatur di dinas keuangan dalam penyaluran program BOS ini, jadi pemerintah harus mengadakan pelatihan bagi aparatur pemerintah yang tugasnya menyalurkan dan mengawasi keberlangsungan pengunaan uang yang dipakai oleh sekolah, supaya tidak ada peyelewengan yang di lakukan oleh pihak sekolah yang mengelolanya.

Evaluasi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan dana BOS adalah evaluasi program penggunaan dana BOS. Evaluasi pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah. Evaluasi internal dilaksanakan oleh evaluator sekolah yaitu Tim Manajemen BOS sekolah. Evaluasi internal lebih bersifat pembinaan dan evaluasi diri. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk memeriksa ataupun melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Pelaksana evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemenerimaan dan penyaluran Program Dana BOS sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk megawasi dan menyelenggaran program Dana BOS Kota Bandung. Masih dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki skiil di bidang penyelenggaraan Program dana BOS. Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam meringankan biaya pendidikan yang mahal dan nantinya bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bisa mendukung kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

Di bawah ini ada ilustrasi tabel mengenai daftar urut kepangkatan SMPN 29 Kota Bandung, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Urut Kepangkatan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung Tahun 2012

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Didi Kusmadi, M.PD.	9581106198603100	Guru Utama Muda
2	Syaiful Wathan, S.PD.	9570827197711100	Guru Pembina. TK
3	DRA. Ela Amalia	9640720199103203	Guru Pembina
4	Suharti Datun, S.PD.	9590326198203200	Guru Pembina
5	Tati Komariah, S.PD.	9550515198303200	Guru Pembina
6	Tini, S.PD.	9610601198403200	Guru Pembina
7	Yulienah Rambing, S.PD.	9630708198501200	Guru Pembina
8	H.Abdurahman, S.PD.	9600303198603101	Guru Pembina
9	Sartu, S.PD.	9631115198512100	Guru Pembina
10	Sri Heryanti, S.PD.	9650206198703200	Guru Pembina
11	Riyadi Akbar, A.MD.	9591012198111100	Guru Pembina
12	HJ. Uum, S.PD.	9550215198403200	Guru Pembina
13	Dadang Umara, S.PD.	9640215198410100	Guru Pembina
14	Zaitul Asnari, S.PD.	9630428198903200	Guru Pembina
15	DRS. Komara	9570403199302100	Guru Pembina
16	Ayi Rachmat	9590923198212100	Guru Pembina
17	Dadang Taufik, S.PD.	9600526198303101	Guru Pembina
18	Yati Nurhayati, S.PD.	9630421198412200	Guru Pembina
19	Popi Nurhaida, S.PD.	9640424198412200	Guru Pembina
20	Cece Hanapiah Putra, S.PD.	9621210198503101	Guru Pembina

21	DRA. Anita Kartini	9570911198603200	Guru Pembina
22	DRA. Ilis Komalasari	9680602199403200	Guru Pembina
23	Jaja Sudrajat, S.PD.	9580821197803100	Guru Pembina
24	Noneng Surahtini, S.PD.	9581030198501200	Guru Pembina
25	Undang Diana, S.PD.	9651210199203100	Guru Pembina
26	DRA. Hari Purbiyanti	9630122199512200	Guru Pembina
27	Nyi Euis Nurhayati, M.PD.	9710322199702200	Guru Pembina
28	HJ. Yuyun Wahyuningsih	9690919199103200	Guru Pembina
29	Iskandar Gana Siswanto	9631107198403100	Guru Pembina
30	Sopiyah, S.PD.	9660302198803200	Guru Pembina
31	Suyatmi, S.PD.	9660110199802200	Guru Pembina
32	Danu Wijanarko, S.PD.	9670311199512100	Guru Pembina
33	Eri Riyanah, S.PD.	9681221199802200	Guru Pembina
34	Wahyuni Maritha, S.PD.	9690329200003200	Guru Pembina
35	Ni Made Deriti, S.PD.	9540717198703200	Guru Pembina
36	Sartono, S.PD.	9680710200501101	Guru Dewasa
37	Asep Eka Priyadi, S.PD.	9761012200501101	Guru Dewasa
38	Ferry Timorochmadi, S.PD.	9820220200604100	Guru Dewasa
39	Dyane Rismawanty, S.PD.	9820818200604201	Guru Dewasa
40	Deni Sahendi, S.PD.	9761228200501201	Guru Muda
41	Lela Kamalia, M.M.	9720105200501201	Guru Madya
42	Titin Sutinah, S.AG.	9710207201101200	Guru Madya
43	Dedeh Rohaeti, S.PD.	9820329201101200	Guru Madya
44	Sudarmaji, A.MD.	9710512200801100	Guru Muda
45	DRS. Ma’sum Komarudin	9690819200312100	Guru Dewasa
46	Nugraha Djuwanda, S.PD.	9550308198603101	Pelaksana TU
47	Ari Munandar	9640819199003100	Pelaksana TU

Kesimpulannya, indikator tenaga ini sudah cukup baik hanya saja perlu ditambah jumlah tenaga teknis penyaluran dana BOS yang tugasnya mendistribusikan perlengkapan-perlengkapan yang berupa buku dan barang-barang operasional lainnya.

4.2.2 BiayaProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator biaya sendiri yaitu berhubungan dengan suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu untuk memudahkan pengambilan keputusan. Sebelum program dana BOS ini diimplementasikan ke sekolah-sekolah ada kajian-kajian yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu diantaranya Dinas Pendidikan Kota Bandung, Supaya program dana BOS ini berhasil diimplementasikan.

Berhubungan dengan biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya yang diperlukan rata-rata tiap siswa pertahun sehingga mampu menunjang proses belajar. Cara penggunaan BSP dibedakan menjadi BSP investasi dan BSP operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang termasuk biaya personil dan biaya non personil.

Bidang pembelanjaan dan ekstrakulikuler merupakan bidang yang memiliki banyak sub-sub bidang yang membutuhkan alokasi dana tidak sedikit tetapi berdasarkan alokasi dana yang terdapat pada rencana anggaran tercantum 15%. Data tersebut dapat dilihat pada halaman ***54 poin C.***Kegiatan pembelanjaan dan ekstrakulikuler mencakup pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pengembangan pendidikan berkarakter, kegiatan lomba, kegiatan MPLS, kegiatan Porak, kegiatan pentas seni, kegiatan PMR/UKS, kegiatan pramuka, kegiatan

OSIS, pembelian alat olahraga pembelian alat kesenian. Dilihat dari kegiatan-kegiatan tersebut poin c ini merupakan bidang yang memiliki sub bagian paling banyak diantara bidang-bidang yang lain.

Menurut peneliti alokasi biaya harus ditambah untuk ***poin C*** ini. Mengingat dari kegiatan-kegiatan yang peneliti tulis tersebut seperti pentas seni, kegiatan lomba itu merupakan hal yang wajib yang harus diselenggarakan sekolah untuk mengasah bakat para siswa dan hal tersebut harus mendapat perhatian serius dari kepala sekolah, komite sekolah dan tim manajemen sekolah untuk meningkatkan kualitas para siswa.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar), guru tidak tetap, pengembangan profesi guru. Sedangkan biaya non personil yaitu biaya untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar (KBM), pembinaan kesiswaan. Selain biaya-biaya tersebut masih ada biaya operasional yang ditanggung siswa yaitu seperti biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, ekstrakulikuler.

Masyarakat yang tidak mampu merasa terbantu dengan adanya program dana BOS Kota, yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Bantuan yang diberikan hanya sebatas bantuan operasional, biaya yang dibebankan yaitu dalam pembelian seragam sekolah bagi siswa baru, mungkin untuk baju biru putih yang dipakai untuk segaram mereka setiap hari, mereka bisa membelinya diluar sekolah tapi jika untuk seragam batik mereka harus membelinya kepada sekolah.

Untuk angkutan umum untuk ke SMPN 29 Kota Bandung sangat susah, dan kebanyakan siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung harus jalan kaki yang

sangat jauh untuk menemukan angkutan umum yang akan mereka tumpangi untuk pulang kerumahnya masing-masing. Efesiensi mengenai biaya yang dibutuhkan sudah dipenuhi oleh sekolah, seperti alat tulis, buku-buku pelajaran yang mereka butuhkan tidak perlu dengan membeli buku, tapi sekolah telah meyediakan bukunya dan buku itu pun bisa dipinjam oleh siswa yang membutuhkannya dengan ketentuan syarat yang telah diterntukan oleh sekolah tersebut.

Kesimpulannya, bahwa indikator biaya 20% yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Bandung sudah baik karena hal tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah Kota Bandung dalam bidang pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.

4.3 KecukupanProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator ketiga yaitu kecukupan. Menurut Dunn kecukupan dalam suatu kebijakan merupakan dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Itu artinya bahwa kebutuhan siswa yang berkaitan dengan kebutuhan operasional siswa sudah dapat terpenuhi semuanya. Apabila program dana BOS Kota Bandung ini dinilai sudah mencukupi kebutuhan operasional para siswa yang berada di SMPN 29 Kota Bandung maka secara otomatis orang tua siswa tidak merasa terbebani lagi dengan anaknya bersekolah.

Kecukupanmerupakan kebutuhan yang terpenuhi karena dikelola oleh sekolah yang menerima dana BOS Kota Bandung. Berdasarkan dari hasil wawancara saya kepada masyakat kota bandung tenyata dana BOS itu tidak

disalurkan kepada siswa yang membutuhkannya tapi uang dana bos tersebut di kelola oleh sekolah tidak diberikan kepada orang yang mampu padahal ternyata masih banyak siswa SMPN 29 itu yang membutuhkan dana tersebut. Padahal yang membutuhkan dana tersebut masih banyak seperti ibu rumah tanggga yang saya wawancarai itu hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan harus melengkapi semua kebutuhan anaknya sekolah, seharusnya pihak sekolah bisa melihat dari kelengkapan sekolah yang dibutuh oleh siswa-siswinya, dan mendata pekerjaan orang tuanya, jika orangtua siswa-siswi tidak bisa memeneuhi pihak sekolah harus memberiakan uang tunai secara langsung untuk melengkapi kebutuhan. Yang dibutuhkan oleh mereka dalam mendukung terselenggaranya program dana BOS tersebut.

Dilihat dari keseluruhan kebutuhan yang mencakup tiga belas bidang diantaranya pembelian buku teks pelajaran, kegiatan PPDB, kegiatan pembelanjaan dan ekstrakulikuler, kegiatan ulangan dan iuran, pembelian alat dan bahan habis pakai, langganan daya dan jas, biaya perawatan/pemeliharaan, pembayaran honor guru dan pegawai honorer, pengembangan profesi guru, bantuan transport siswa miskin, pengelola BOS, pembelian komputer dan printer, dan lain-lain. Dana BOS Kota Bandung yang dialokasikan oleh pemerintah kota bandung sudah cukup karena masing-masing bidang sudah mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhannya walaupun ada beberapa bidang yang peneliti rasa masih kurang. Data tersebut dapat dilihat pada halaman ***54 poin M***, poin m itu disebutkan kebutuhan lain-lain yang kurang jelas untuk pendanaan apa saja sehingga menurut peneliti anggaran 1,5% harus dikurangi sebesar 1% saja. Walaupun demikian pengeluaran lain-lain tersebut disertakan juga dengan

kwitansi-kwitansi pengeluaran sehingga tidak rawan apabila ada masalah penyalahgunaan.

Kedua, pada poin pembayaran honor guru dan pegawai honorer harusnya ditambah alokasi dana sebesar 20% tersebut masih kurang karena di SMPN 29 Kota Bandung masih terdapat 11 guru honorer dan guru PNS 47 secara keseluruhan ada 58 guru. Guru honorer ini lah yang mendapat alokasi dana BOS Kota Bandung. Jadi, masih kurang cukup alokasi sebesar 20% tetapi secara keseluruhan anggaran BOS Kota Bandung sudah mencukupi keseleruhan kebutuhan yang mencakup ketiga belas bidang tersebut.

Pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa supaya dapat mempertahankan kualitas pendidikan dan pendidikan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Terutama masyarakat yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan minimal sembilan tahun.

Dilihat dari faktor kecukupan cukup baik alokasi dana yang dikeluarkan untuk pendidikan. Bisa dilihat pada tabel rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 alokasi 100% untuk siswa sebanyak 1.200 siswa sedangkan persiswa mendapat jatah Rp. 710.000 pertahun.

Dengan alokasi anggaran sebesar 710.000 persiswa sudah cukup baik. Walau demikian masih ada tanggung jawab sekolah terutama dalam hal ini yaitu komite sekolah, kepala sekolah dan bagian tata usaha untuk memprioritaskan dana untuk alokasi transport siswa miskin yang masih 0%. Hal tersebut menurut peneliti menjadi prioritas karena menurut hasil di lapangan dengan beberapa orang tua siswa masalah biaya transport termasuk kendala bagi orang tua yang

miskin. Biaya transport masuk pada kategori biaya operasional yang belum menjadi perhatian lebih bagi SMPN 29.

4.3.1 Kebutuhan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Kebutuhan siswa bukan hanya masalah operasional saja tetapi biaya transportasi para siswa yang dalam hal ini letak demografi SMPN 29 jauh dari akses angkutan kota yang mengharuskan siswa menggunakan ojek yang secara ekonomi menggunakan jasa ojek tersebut lebih mahal daripada angkutan kota.

BOS disini pemaknaannya hanya menyangkut dana operasional untuk menunjang prestasi dan mutu pendidikan para siswa di SMPN 29 Kota Bandung. Maka dengan demikian fokus BOS Kota Bandung ini menangani hal-hal yang berkenaan dengan urusan-urusan operasional siswa.

Tetapi akan menjadi suatu masalah yang memiliki korelasi apabila dana BOS ini disalahgunakan. Sehingga nilai kecukupan itu belum dapat terpenuhi oleh para siswa penerima dana BOS dilihat dari banyaknya faktor yang melatarbelakangi kebutuhan para siswa itu sendiri. Dan faktor yang mempengaruhi indikator dari kecukupan ini yaitu tingkat ekonomi orang tua siswa yang berada di SMPN 29 Kota Bandung.Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala TU SMPN 29 Kota Bandung bahwa mayoritas pekerjaan orang tua siswa di SMPN ini yaitu buruh, pedagang dan minoritas atau sebagian kecil PNS.

Sarana dan prasarana yang ada di SMPN 29 Kota Bandung belum memadai karena ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada SMPN 29 tidak dikelola secara efektif. Kewenangan besar yang mengelola dana

BOS di sekolah seseorang mempunyai keahlian dibidang pengunaan dana BOS. Dalam memenuhi fasilitas di disekolah pemerintah pusat juga bisa membantu. Kebutuhan sarana dan prasarana

Kebutuhan yang diperlukan oleh SMPN 29 Kota Bandung sarana untuk mendukung berjalannya perlaksanaan program sekolah supaya bisa berjalan lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Kebutuhan adalah alat pendukung dalam menjalankan sesuatu perkerjaan yang maksimal, seperti alat fotocopy, komputer, printer, buku, meja dan kursi yang layak pakai.

Kebutuhan yang diperlukan bagi siswa dalam menyelenggarakan proses belajar disekolah alat tulis, buku-buku, dan bagi siswa yang tidak mampu juga pasti membutuhkan baju, dan alat transportasi untuk menempuh jarak antara rumah dan sekolah.Sekolah belum bisa melengkapi kebutuhan siswa yang kurang mampu dalam mendukung berjalannya pendidikan yang baik, seperti baju, tas, sepatu dll, dalam hal ini pihak sekolah harus bisa memenuhi kebutuhan siswanya dalam melakukan penyelengggaraan program dana BOS Kota Bandung.

Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan para siswa. Supaya pengelolaan dana BOS berjalan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan bagian tata usaha untuk membuat anggaran yang dibutuhkan para siswa.

4.3.2 Nilai Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Nilai program dana BOS Kota Bandung itu sendiri yaitu berkaitan dengan suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang tidak pantas atau yang pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai. Itu berarti bahwa program BOS ini akan mendapatkan nilai posistif didalam proses implementasinya.

Sejauh ini baik pemerintah atau masyarakat menilai bahwa program BOS ini merupakan ketegasan sikap dan kebijaksanaan pemimpin daerah dalam hal ini walikota bandung supaya masyarakat kota bandung mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Terutama dalam memenuhi kewajiban yang ditulis dalam undang-undang dasar 1945 amandemen keempat bahwa pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Adanya pendidikan yang berkualitas dapat menjadikan sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki budi yang luhur untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Baik orang kaya maupun kurang mampu atau dalam keadaan miskin sekalipun berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa melihat latar belakang sosial seseorang.Menurut peneliti indikator nilai ini sudah cukup diimplementasikan di SMPN 29 Kota Bandung. Dimana siswa-siswi Kota Bandung memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Diantaranya siswa-siswa SMPN 29 Kota Bandung mengisi jam-jam belajar di sekolah mereka dengan tidak membolos dan prestasi yang membanggakan.

Ada juga kegiatan ekstrakulikuler seperti olahraga futsal dan paduan suara yang diikuti siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung. Ekstrakulikuler tersebut merupakan wadah sosialisasi para siswa untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan satu sama lain pada jam-jam di luar sekolah yang bernilai positif.

Melalui kegiatan ekstrakulikuler itulah dana BOS juga turut berperan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala TU SMPN 29 Kota Bandung *"Bahwa penggunaan dana BOS itu sendiri diantaranya untuk memberikan dana operasional bagi kegiatan-kegiatan siswa yang ikut dalam perlombaan-perlombaan di bidang ekstrakulikuler"*(13 Juni 2013).

Kegunaan dari tujuan nilai yang terkandung tidak membebani siswa karena adanya dana BOS bisa membantu kebutuhan sekolah. Dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada SMPN 29 Kota Bandung berapa jumlahnya yang diterimanya mencukupi atau tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan itu tergantung dari pengelolaan keuangan dana BOS tersebut. Tujuan dana BOS Kota yang disalurkan dari pemerintah daerah melalui rekening sekolah untuk membantu kebutuhan sekolah.

BOS Kota dianggarkan oleh pemerintah kota melalui semacam bentuk tembusan kepada dinas pendidikan. Dinas pendidikan hanya mengelurkan berbentuk cek yang diberikan kepada pihak sekolah yang menerimanya, dan pihak sekolah yang akan mecairkan uang tersebut untuk mememnuhi kebutuhan SMPN 29 Kota Bandung. Verifikasi tanda tangan yang di tandatangani oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.

Kesimpulannya dalam hal ini yang menganggarkan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah pemerintah, jadi sekolah hanya mengelola dana tersebut akan digunakan untuk keperluan sekolahnya.

4.4 PerataanProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator yang keempat yaitu perataan. Dimana menurut Dunn definisi perataan yaitu keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Untuk pengadaan program BOS ini, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325,3 miliar. Akibatnya, belanja tidak langsung Dinas Pendidikan pada 2009 ini meningkat tiga setengah kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini terjadi karena kerelaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di mana anggarannya rela dipotong, bahkan sampai setengahnya. Ini karena mereka memandang pendidikan sangat penting.

Dilihat dari segi pemberian dana BOS Kota sudah merata karena semua SD dan SMP bagi negeri maupun swasta sudah menerima dana BOS Kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung. Tujuan tersebut yang membuat pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan tidak hanya SMP Negeri saja tetapi sekolah swasta juga mendapat bantuan dana BOS yang masuk dalam dana hibah.

Saat ini bahwa tidak dapat dipungkiri banyak opini masyarakat yang berkembang bahwa sekolah swasta hanya menjadi nomor dua setelah sekolah negeri. Realitanya pemerintah Kota Bandung telah menumbuhkan rasa percaya diri kepada sekolah-sekolah swasta karena dalam program BOS Kota ini sekolah swasta mendapatkan prioritas sebagai penerima bantuan.

Pendidikan itu seyogyanya harus merata mengenai distribusi kebutuhan siswa seperti buku-buku pelajaran. Akses lokasi yang mungkin terdapat kendala bukanlah alasan pendistribusian kebutuhan siswa itu tidak merata apalagi terjadi keterlambatan. Hal yang terpenting yaitu sekolah-sekolah yang susah untuk diakses menjadi perhatian utama pemerintah Kota Bandung supaya apa yang diterima oleh sekolah yang memiliki keterbatasan akses bisa mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah yang berada di tengah-tengah kota dimana sekolah-sekolah tersebut sudah lebih dulu mengenal perkembangan teknologi, akses membeli buku mudah karena dekat dengan pusat perbelanjaan yang terdapat toko buku, transportasi yang mudah.

Adanya program BOS yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal baik karena target minimal pendidikan bukan enam tahun melainkan sembilan tahun. Jenjang pendidikan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat yang mampu saja melainkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Program BOS ini untuk memberikan hak anak-anak di Kota Bandung supaya bisa merasakan pendidikan.

Adanya program BOS yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal baik karena target minimal pendidikan bukan enam tahun melainkan sembilan tahun. Jenjang pendidikan

tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat yang mampu saja melainkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Program BOS ini untuk memberikan hak anak-anak di Kota Bandung supaya bisa merasakan pendidikan.

Perataan pengalokasian dana BOS ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi efisiensi terhadap penggunaan dana BOS semaksimal mungkin sehingga kebutuhan masing-masing bidang terpenuhi dan tidak berat sebelah untuk mencapai keadilan. Di bawah ini ada skema yang menggambarkan alokasi penggunaan dana BOS yang belum merata.

Ada bidang-bidang yang alokasi dana nya begitu kecil dan ada bidang-bidang yang alokasi dana nya lebih besar diantara bidang-bidang yang lain. Contohnya alokasi yang mendapat anggaran besar seperti kegiatan pembelanjaan dan ektrakulikuler, kegiatan ulangan dan iuran, pembelian alat dan bahan habis pakai, serta honor guru. Keempat bidang tersebut mendapat alokasi dana lebih besar dibandingkan yang lainnya yang rata-rata 4-6% sisanya 1% saja.

Untuk masalah perataan yang terdapat pada rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS pada halaman 54 bahwa ada pembagian alokasi anggaran yang masih sangat minim dan ada anggaran yang jumlah presentase nya cukup besar. Hal tersebut masih belum merata. Namun demikian tidak hanya itu, menurut peneliti setiap bidang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga mencapai perataan. Perataan akan tercapai apabila masing-masing sub bagian mendapatkan alokasi dana yang cukup dan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain tidak tumpang tindih.

Misalnya yaitu pada ***poin D*** membahas mengenai biaya kegiatan ulangan dan iuran, kegiatan tersebut terdiri dari biaya kegiatan ujian sekolah, biaya kegiatan ujian nasional, kegiatan UAS semester I, Kegiatan ulangan harian serta UTS semester I dan II. Dimana masing-masing harus mendapatkan alokasi dana yang seimbang.

Kesimpulannya, menurut peneliti bahwa perataan masih jauh dari yang diharapkan. Komite sekolah beserta jajarannya seharusnya menggunakan data seakurat mungkin dan survei lapangan dengan melihat kondisi siswa dan latar belakang orang tua siswa sehingga siswa benar-benar difasilitasi dengan maksimal. Pihak pembuat rancangan anggaran penggunaan dana BOS juga harus melalui data riil di lapangan sehingga ada rasa empati yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaksana dan pengawas.

4.4.1 Kewajaran Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Program BOS Kota Bandung ini sudah diselenggarakan di Kota Bandung sejak tahun 2009 sampai saat ini. Berkaitan dengan program BOS Kota yang sedang berjalan sampai tahun 2013 ini ada beberapa permasalahanyang harus dievaluasi diantaranya poin kewajaran. Kewajaran menurut Dunn adalah “keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apabila analisa yang berkaitan dengan indikator kewajaran mengacu pada teori di atas yaitu kewajaran adalah kesetaraan dimana kesetaraan yang akan diwujudkan mengacu pada dasar kebijakan itu dibuat diantaranya peraturan

perundang-undangan yang menjadi landasan terselenggaranya BOS Kota Bandung.

Bahwa yang selalu menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program BOS ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar yang mengawali proses wajib belajar enam tahun menjadi wajib belajar sembilan tahun. Hal tersebut berarti seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kota Bandung sendiri dari tahun 2009 sudah fokus terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa saat ini anak-anak Indonesia harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai tingkat SMP. Program BOS disinyalir menjadi fokus pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mengentaskan angka putus sekolah di karenakan mahalnya biaya pendidikan apabila tidak ada bantuan dari dana BOS.

Pada tahun 2011 dikeluarkan aturan yang menjadi landasan pelaksanaan program BOS di Kota Bandung yaitu Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.0003-DPKAD/2011 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Anggaran 2011.

Hasil rekapitulasi yang di rencanakan oleh SMPN 29 yang telah di rinci selama 1 tahun tidak semua poin itu wajar, ternyata masih ada poin yang harus di kurangi untuk bisa digunakan di poin yang lain. Contohnya pada ***poin F*** yang

direalisasikan untuk langganan daya dan jasa yang digunakan untuk langganan listrik, langganan telpon, langganan internet, penggangkutan sampah saya rasa dengan alokasi sebesar 6% masih belum di realisasikan secra tepat karena masih ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh kepentingan yang lainya seperti pada poin K yang digunakan untuk pengelola BOS yang untuk membeli materai, photo copy, pejilidan, dan transport dinas yang dialokasikan hanya 1.00% itu bagi saya harus di tambah, supaya pengelolaan dana BOS bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

Keputusan tersebut yang menjadikan landasan bagi terbentuknya Tim Manajemen BOS di SMPN 29 Kota Bandung. Bagi peneliti kewajaran dalam hal ini mengenai penunjukkan pejabat pengguna anggaran oleh Walikota Bandung merupakan hal yang wajar karena suatu program dari awal proses pelaksanaan sampa berakhirnya program tersebut dalam suatu periode tertentu memang dibutuhkan peran pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya program BOS karena hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi.

Hasil wawancara dengan kepala TU SMPN 29 Kota Bandung mengenai indikator kewajaran, bahwa:

> “Kewajaran itu relatif karena pemerintah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan sangat banyak tapi pemerintah hanya bisa memabantu kebutuhan untuk mendukung sarana dan prasarana yang diperlukan oleh siswa dan pegawai SMPN 29 demi kelancaran menjalankan tugas bisa berjalan dengan efektif “ (10 Juni 2013).

Jumlah yang diberikan pemerintah daerah Kota Bandung kepada siswa sudah sejawarnya karena pemerintah sudah membantu siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, walaupun dana yang diberikan pemerintah dearah

tidak memenuhi kebutuhan di SMP ini, tapi masih ada bantuna juga dari BOS Pusat dan BOS Provinsi yang membantu untuk melengkapi kebutuhan SMP 29 Kota Bandung.

Pembagian dana BOS Kota Bandung yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung dari hasil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diprogramkan untuk pendidikan anak asli daerah kota bandung. Menurut hasil penelitian saya pembagian dana BOS sudah diselenggarakan secara wajar, karena sudah diberikan kepada sekolah.

4.4.2 KeadilanProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Ada seorang ahli yang mendefinisikan bahwa keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Dari hasil wawancara kepada kepala TU *"tidakadil karena disamaratakan anak yang mampu dan yang tidak mampu menerima dana BOS"* (10 Juni 2013). Dari 100% orang tua anak di sini mempunyai perkerjaan yang berbeda-beda, karena hanya 20% orangtua muridnya yang berpenghasilan mampan atau mampu dan 80% orang tua muridnya berkerja sebagai buruh tani, supir.

Ketidakadilan disini membuat adanya kecemburuan sosial, orang tua yang mampu membiayai pendidikan anaknya jangan diberikan dana BOS tersebut. Bila perlu danaBOS itu harus diberikan kepada siswa yang membutuhkan dan ortuanya yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kepentingan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa SMPN 29 mengenai pemberian dana Dana BOS *"Sudah tepat karena dana BOS itu hanya diterima oleh siswa yang tidak mampu, seperti sekolah memberikan sarana 'yang dibutuhkan siswa siswa yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya tersebut" (10 Juni 2013).*

Dari hasil wawancara tersebut menilai adanya ketidaksesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.Terbantu karena siswa bukan hanya menerima danaBOS kota saja tapi subsidi silang bisa membantu SMPN 29 Kota Bandung. untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan mereka.

Keadilan dari rencana rekapitulasi yang dibuat oleh SMPN 29 Kota Bandung belum bisa dikatakan adil karena pada ***poin G*** biaya perawatan pemeliharaan gedung yang mempunyai pengeluaran untuk memenuhi pelaburan gedung sekolah, perawatan gedung sekolah, perawatan peralatan kantor, perawatan mebelair, perawatan drainse/ saluran air kantor, perawatan instalasi air bersih, perawatan instalasi listrik, di alokasikan dana sebesar 15% belum tepat karena perawatan gedung dan telalu besar poin yang dialokasikannya, bagi saya poin ini harus dikurangi ditahun berikutnya supaya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lainnya. Dari hasil wawancara saya kepada kepala sekolah SMPN 29 Kota Bandung bahwa perawatan pemeliharaan gedung selalu dianggarkan setiap tahunnya bagi peneliti seharusnya biaya perawatan/ pemeliharan gedung dianggarkan 2 tahun sekali, supaya bisa dialokasikan untuk pembayaran honor guru dan pegawai honorer yang belum mencukupi.

Keistimewaan BOS Kota Bandung yaitu pemerintah dalam memberikan alokasi dana BOS ini tidak membedakan antara sekolah negeri ataupun swasta.

Sekolah negeri maupun swasta sama-sama mendapatkan bantuan BOS Kota Bandung. Hal tersebut yang menjadi letak keadilan dimana tidak ada pembedaan bagi pencapaian pendidikan yang berkualitas.

Peneliti menilai hal tersebut sudah cukup adil. Hal yang sering terjadi yaitu sekolah swasta selalu menjadi perhatian nomor dua setelah sekolah negeri. Hal tersebut merupakan nilai positif program BOS Kota Bandung. Perhatian pemerintah Kota Bandung tersebut merupakan dukungan bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga sekolah swasta mendapat dana BOS Kota yang anggarannya masuk dalam dana hibah.

Masyarakat yang masuk dalam ekonomi menengahke bawah merasakan keadilan itu. Mereka juga bisa merasakan pendidikan. Dibebaskannya siswa dari iuran uang gedung dan fasilitas buku cetak yang dimana LKS sudah ditiadakan lagi sangat membantu orang tua siswa yang masuk dalam kategori menengah-ke bawah cukup terbantu.

Pada realitanya masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat menengah-ke bawah tetap merasakan bahwa walaupun saat ini pendidikan sudah cukup terjangkau tetapi tetap merasakan berat untuk menyekolahkan anak mereka karena beberapa faktor yaitu biaya transportasi, biaya seragam, biaya konsumsi, dan biaya alat tulis. Apabila satu kepala sekolah keluarga ada tiga orang anak yang disekolahkan hal tersebut cukup memberatkan.

Kesimpulannya pendidikan di Kota Bandung saat ini sudah cukup baik dinilai dari indikator keadilan sudah cukup adil. Pemerintah Kota Bandung tidak ada pembedaan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas yaitu dengan di bantu nya sekolah swasta dalam program BOS Kota Bandung ini.

4.5 ResponsivitasProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator kelima yaitu responsivitas dimana menurut Dunn responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu negara bahwa dengan jelas negara mempioritaskan pendidikan yang dibuktikan dengan adanya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi *"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa mendapatkan pendidikan yang bai, berkualitas itu merupakan hak setiap warga negara.

Untuk itu sejak dimulainya program dana BOS yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2005. Hal tersebut merupakan landasan awal bagi daerah-daerah untuk melakukan dan menerapkan kebijakan serupa yang berlaku secara nasional. Kota Bandung sendiri memiliki program dana BOS yang dimulai pada Tahun 2009.

Saat ini pendidikan sudah mulai gratis hal tersebut secara tidak langsung membantu perekonomian orang tua siswa dan menjadikan motivasi bagi orang tua siswa khususnya di Kota Bandung untuk menyekolahkan anaknya.

Hanya saja masyarakat sering salah menafsirkan bahwa yang namanya dana BOS itu tujuannya secara garis besar yaitu untuk meringankan biaya-biaya operasional siswa yang berkaitan dengan kebutuhan buku, perlengkapan sekolah seperti bulpoint, pensil, tas, seragam.

Responsivitas masyarakat Kota Bandung begitu baik terhadap program BOS Kota. Ada beberapa orang tua siswa yang mensekolahkan anaknya di SMPN 29 Kota Bandung yang berasal dari keluarga tidak mampu merasa terbantu. BOS memberikan harapan dan membuka jalan sehingga anak-anaknya bisa sekolah.

Kesimpulannya bahwa responsivitas masyarakat dengan adanya program BOS cukup baik. Hal tersebut dilihat dari beberapa opini positif yang ditujukan untuk pemerintah Kota Bandung. Kendala nya bagi masyarakat yang kurang mampu lebih diperhatikan lagi biaya-biaya operasional siswa seperti biaya transportasi, konsumsi, alat tulis dan seragam yang terkadang masih memberatkan orang tua siswa.

4.5.1 MasalahProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Berkaitan dengan indikator responsisvitas yaitu adanya masalah yang dimana *dassein* seringkali berbeda dengan *dassolen*. Adanya tumpang tindih antara *dassein* dengan *dassolen* inilah yang terkadang menghambat responsivitas yang baik di kalangan masyarakat khususnya para orang tua siswa.

Hal tersebut diakibatkan beberapa hal, menurut pengamatan peneliti yaitu tingkat pendidikan orang tua siswa yang rata-rata hanya tamatan SD, SMP paling tinggi SMA dan hanya beberapa orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan sampai perguruan tinggi. Peneliti menilai bahwa tingkat pendidikan orang tua siswa yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana respon orang tua siswa terhadap program dana BOS. Apabila informasi yang mereka terima minim

dan mereka tidak *update* terhadap perkembangan informasi maka yang didapat adalah respon yang kurang baik.

Kendala ini terjadi dari Segi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terutama dari SD, karena banyaknya SD yang menerima dana BOS Kota Bandung ini. Setelah SPJ ini sampai kepada pemerintah daerah ini terjadi perubahan karena anggaran yang diberikan SD kepada pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan, yang seharusnya membelai peralatan atau kelengkapan yang sangat penting, tapi terkadang hal yang tidak pentingpun dianggarkan dari situ lah adanya perubahan anggaran yang membuat ketelambatan penyaluran dana BOS tersebut.

Salah satu kendala dalam bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, sekolah yang mengelola program dana BOSsebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya yang dilakukan disekolah mengenai informasi manajemen tentang pelaksanaan program dana BOS Kota Bandung.

4.5.2 Aspirasi MasyarakatProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator aspirasi masyarakat ini termasuk poin penting bagi proses evaluasi kebijakan program BOS Kota Bandung karena aspirasi masyarakat merupakan salah satu komponen yang mengandung makna bahwa masyarakat memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

program pendidikan hal tersebut telah diatur dalam bagian hak dan kewajiban masyarakat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal yang berkaitan dengan aspiasi masyarakat sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu berarti masyarakat memiliki hak sebagai alat kontrol berjalannya program BOS Kota Bandung yang sudah berlangsung dalam kurun waktu empat tahun ini.

Peneliti rasa dalam kurun waktu empat tahun ini program BOS Kota Bandung yang saat ini masih berjalan melalui proses dan mekanisme yang dilewati. Tetapi hal selalu menjadi bahan evaluasi yaitu proses sosialisasi yang tidak sampai kepada orang tua siswa. Masih banyak orang tua siswa yang ketika peneliti wawancarai, mereka masih belum mengetahui dengan baik tujuan dari program BOS Kota Bandung.

Masyarakat yang dalam hal ini adalah wali siswa hanya mengetahui bahwa dengan adanya program BOS Kota Bandung ini pendidikan menjadi gratis. Relevansinya yaitu uang gedung ditiadakan, uang SPP sudah tidak dipungut lagi, LKS ditiadakan. Biaya-biaya tersebut otomatis sudah tidak menjadi beban wali siswa karena sudah ada dan BOS Kota Bandung.

Seiring dengan hal tersebut, peneliti tidak menemui proses pencerdasan masyarakat berkaitan dengan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah selama ini mengeluarkan beberapa kebijakan namun masyarakat tidak tersentuh oleh pemahaman terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut.

Pemerintah harus memperhatikan bahwa masyarakat terbagi-bagi menjadi beberapa golongan menurut tingkat pendidikannya. Ada masyarakat yang berasal dari keluarga yang berpendidikan biasanya mudah menerima dan memahami maksud dan tujuan dari suatu program yang dibuat oleh pemerintah. Ada masyarakat yang masuk kategori masyarakat yang tidak berpendidikan dimana biasanya masyarakat tersebut tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali dan hanya lulusan sekolah dasar bahkan ada diantara mereka tidak mampu mebaca dan menulis.

Melihat hal tersebut harusnya pemerintah memiliki cara supaya masyarakat turut aktif dalam proses evaluasi kebijakan program BOS Kota Bandung. Masyarakat yang berperan sebagai alat kontrol. Apabila pemerintah hanya fokus terhadap program yang diselenggarakan tetapi tidak begitu memperhatikan partisipasi masyarakat dan memberikan sosialisasi yang tepat sehingga masyarakat mengetahui tujuan BOS Kota Bandung.

Hasil wawancara yang dikeluhkan dari masyarakat mengapa siswa yang mampu bisa menerima dana BOS sedangkan masih banyak siswa yang kurang mampu besaran jumlah dana yang diterima sama. Masyarakat merasa hal tersebut tidak adil

Evaluasi kebijakan program penyaluran dana BOS terkait pada indikator aspirasi masyarakat dimana masyarakat harus dilibatkan untuk benar-benar mengetahui tujuan dana BOS Kota yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung. Saat ini pemerintah dituntut untuk transparan. Keterbukaan tersebut salah satunya yaitu adanya aspirasi masyarakat. Aspiasi masyarakat akan muncul apabila ada stimulasi berupa rangsangan-rangsangan yang diberikan pemerintah kepada

masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai program BOS Kota Bandung yang sudah berjalan.

Aspirasi masyarakat merupakan hal yangs angat penting tetapi pada realitanya pemerintah kurang mensosialisasikan program BOS ini melalui suatu kegiatan dimana masyarakat yang terdiri dari orang tua siswa, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pendidikan, wartawan dan *stakeholder* berkumpul untuk memberikan pengarahan mengenai program dana BOS Kota Bandung. Dengan demikian proses pengawasan itu bukan hanya sekedar formalitas dalam masalah yang begitu penting yaitu program dana BOS Kota Bandung yang telah diimplementasikan.Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan karena hal tersebut bisa dijadikan fungsi pengawasan pada program pemerintah yang sedang berjalan. Dengan kata lain dampak yang didapat dari aspirasi masyarakat yaitu saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan program dana BOS kedepannya.

Adanya evaluasi kebijakan yang memang berjalan dengan baik seharusnya memang ditekankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang sedang berjalan. Jangan sampai program pemerintah yang begitu penting bagi keberlangsungan terciptanya pendidikan yang berkualitas justru fungsi pengawasannya diabaikan begitu saja dan hanya dijadikan formalitas.

Selama ini banyak sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menyentuh pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan tujuan dari program dana BOS Kota Bandung. Masyarakat dianggap sebagai benda mati yang seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengetahui dan hanya sebagai penerima kebijakan yang telah dibuat. Padahal masyarakat seharusnya dilatih untuk kritis dan

mendapatkan informasi seakurat mungkin dari pihak pemerintah sebagai pelaksana program BOS Kota Bandung yang memiliki maksud dan tujuan yang fundamental.

Bentuk transparansi yang diwujudkan oleh SMPN 29 Kota Bandung berdasarkan hasil observasi di lapangan yaitu tidak ada keluhan yang dirasakan masyarakat karena semua perencanaan pengeluaran adanya transparansi karena hasil pengeluran ditempel dimading sehinggga semuaorang bisa melihat pengelurannya secara terperinci.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SMPN 29 Kota Bandung bahwa "sosialisasi itu ada dalam bentuk rapat orang tua siswa saat penerimaan siswa baru" (13 Juni 2013). Artinya sosialisasi memang diadakan oleh pihak sekolah hanya saja rapat tersebut hanya sekali diadakan dan banyak orang tua siswa ketika ditanya mengenai jumlah dana BOS yang diterima per siswa mereka jawab tidak tahu.

Menurut peneliti indikator aspirasi masyarakat ini masih kurang. Pemerintah lebih mengutamakan hasil. Hasilnya yaitu masyarakat merasa terbantu tetapi lupa untuk mendidik masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengevaluasi program BOS yang sedang berjalan.

Peneliti menilai bahwa masyarakat perlu dijadikan kontrol sosial dimana kebijakan pemerintah seperti BOS Kota Bandung ini perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mengetahui informasi yang akurat pada kenyataannya saja sosialisasi yang merupakan bagian dari proses suatu kebijakan

pemerintah hasilnya sering tidak memuaskan sehingga masyarakat paham terhadap adanya suatu kebijakan BOS Kota Bandung.

4.6 KetepatanProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Indikator keenam yang merupakan indikator terakhir yaitu yang berhubungan dengan ketepatan dimana menurut Dunn ketepatan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Masalah yang berkaitan dengan ketepatan yaitu seperti adanya keterlambatan dalam proses penyaluran dana BOS. Itu diakibatkan oleh masalah teknis. Menurut hasil wawancara dengan kepala Tata Usaha SMPN 29 Kota Bandung *"Bahwa masalah teknis yang menghambat proses penyaluran dana BOS yaitu tumpang tindih antara pelaksanaan program BOS dengan program pemerintah Kota Bandung lainnya" (10 Juni 2013).*

Maksud dari pernyataan di atas yaitu bahwa ada indikasi bahwa program BOS Kota Bandung mengesampingkan program-program pemerintah lainnya. Karena alokasi APBD Kota Bandung dialihkan sebanyak 20% untuk pendidikan sesuai amanat undang-undang.

Ada beberapa pihak yang merasa program dana BOS Kota Bandung kurang tepat.Lihat saja jalan-jalan yang ada di Kota Bandung yang merupakan bagian dari infrastruktur Kota Bandung. Masih terdapat jalan-jalan yang

berlubang dan fokus pemerintah teralihkan kepada infrastruktur-infrastuktur lainnya.

Peneliti menilai sudah cukup tepat karena perataan mencakup SD dan SMP sebagai lembaga penerima BOS sebagai wujud pemenuhan pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Bandung. Program ini sudah menjawab permasalahan sebagian masyarakat kurang mampu yang beberapa tahun ke belakang masih terasa sulit untuk menempuh pendidikan dasar. Sebelum undang-undang tentang sistem pendidikan direvisi, pemerintah hanya mencanangkan program wajib belajar enam tahun yaitu hanya sampai tingkat SD saja.

Saat ini setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan setelah undang-undang tersebut diterbitkan pemerintah maupun pemerintah daerah berpedoman pada regulasi tersebut untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk itu ditingkatkan lagi level pendidikan dasar yang semula hanya enam tahun saat ini masyarakat berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan dasar sampai sembilan tahun.

Ada beberapa jumlah presentase anggaran dana BOS yang kurang tepat pada rencana anggaran seperti pada ***poin F*** yaitu bidang langganan daya dan jasa dimana pada poin tersebut biasanya sekolah mengadakan layanan internet. Internet tersebut digunakan untuk siswa supaya siswa berpengetahuan luas dengan mencari informasi-informasi mengenai pelajaran dengan cara yang mudah. Tetapi menurut hasil pengamatan peneliti hal tersebut belum digunakan dengan maksimal dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah yaitu

dengan melihat menu-menu pada website SMPN 29 Kota Bandung yang tidak *update.*Mengingat dana yang dialokasikan sebesar 6% dan menurut peneliti harus dikurangi karena faktor tidak maksimalnya sekolah mengelola layanan internet.

Berkaitan dengan ***poin F*** yang belum maksimal, ada ***poin G*** yang membahas mengenai biaya perawatan/perawatan yang mendapat alokasi dana sebesar 15%. Menurut peneliti sudah tepat alokasi sebesar 15% karena alokasi dana tersebut digunakan untuk pelaburan gedung sekolah, perawatan gedung sekolah, perawatan peralatan kantor, perawatan mebel air, perawatan *drainase* atau saluran air kantor, perawatan instalasi air bersih, perawatan instalasi listrik. Berdasarkan kondisi di lapangan bahwa saat ini SMPN 29 Kota Bandung sedang membangun bangunan baru untuk tambahan kelas. Hal tersebut merupakan kondisi baik dimana dengan jumlah siswa yang berminat sekolah ke SMPN 29 meningkat membutuhkan kelas baru.

Program BOS sudah cukup tepat diimplementasikan di Kota Bandung hanya saja BOS bukanlah satu-satu nya program yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Kota Bandung. Namun demikian BOS harus dijadikan motivasi siswa untuk berkompetisi secara sehat.

Pemerintah bukan hanya fokus pada tujuan saja tetapi proses daripada program BOS itu sendiri dimana siswa harus dituntut untuk berprestasi. BOS bukan hanya pembuka jalan bagi masyarakat yang tadi nya kesulitan akses tetapi BOS merupakan kunci bagi siswa meraih prestasi. Hal tersebut yang belum dijadikan komitmen bagi pemerintah Kota Bandung.

Kesimpulannya, ketepatan program BOS sudah cukup tepat karena BOS telah membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan menengah-ke bawah untuk

mendapatkan akses pendidikan yang layak. Namun demikian BOS belum mampu menjawab munculnya prestasi-prestasi siswa yang seharusnya menjadi komitmen pemerintah Kota Bandung.

4.6.1 SasaranProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Sasaran merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.

Mengenai penyusutan dana tersebut yaitu karena pogram BOS ini menggunakan dana APBD sehingga ada beberapa urusan-urusan pemerintah lainnya menjadi terbengkalai. Seperti halnya masalah jalan di Kota Bandung, merupakan fasilitas umum yang ditangani SKPD lain. APBD merupakan salah satu alat untuk anggaran belanja daerah. Fokus pemerintah saat ini dalam anggaran belanja daerah yaitu 20% untuk pendidikan. Sementara itu sangat banyak kebutuhan belanja Kota Bandung bukan hanya masalah jalan tetapi kesehatan yang juga membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandung.

Apabila Pemerintah Kota Bandung sudah fokus terhadap pendidikan sasaran yang harus dicapai yaitu tidak ada lagi masyarakat yang susah mengakses pendidikan. Pemerintah harus berkomitmen bahwa kualitas pendidikan di Kota Bandung semakin baik artinya dengan pemerintah tidak mementingkan kuantitas yang menjangkau pendidikan sudah sesuai target tetapi hal yang terpenting yaitu

pembinaan terhadap siswa-siswa yang berprestasi untuk membangun Kota Bandung.

Sasaran yang diharapkan bukan hanya sasaran jangka pendek tetapi sasaran jangka panjang. Sasaran yang dicapai bukan saja terpaku pada suatu anggaran pada suatu periode tertentu tetapi sasaran yang berkelanjutan. BOS tidak hanya sebuah stigma sekolah gratis sehingga siswa tidak berkewajiban memberikan prestasi maksimalnya. BOS adalah langkah awal dimana pemerintah menuntut supaya dengan adanya BOS Kota siswa bisa berprestasi sebanyak-banyaknya dalam tingkat kota ataupun tingkat nasional.

Berdasarkan hasil wawancarakepala TU SMPN 29 Kota Bandung menyatakan sudah tepat sasaran dalam pemberian dana BOS yang di selenggarakan oleh pemerintah kota, karena dana itu diterima oleh siswa, tapi siswa tidak menerima uang, melainkan barang yang dibutuhkan oleh mereka. Jika ada siswa yangdilihat dari gurunya fasilitas yang mereka miliki sudah tidak layak pakai seperti tas, baju. Guru akan memenuhi kebutuhannya.

Terdapat beberapa sasaran yang peneliti nilai masih belum mencapai sasaran. Kondisi tersebut dilihat dari rancangan alokasi penggunaan dana BOS. Seperti yang dilihat pada halaman ***54 poin J.****Poin J*membahas mengenai Bantuan Transport siswa miskin yang masih belum direalisasikan karena anggaran yang tercantum pada poin tersebut sebesar 0%. Padahal menurut peneliti poin tersebut merupakan bagian penting bagi kegiatan operasional siswa yang memberatkan orang tua siswa salah satunya biaya transportasi.

Kebanyakan orang tua siswa yang kurang mampu merasa berat mengeluarkan biaya transport yang memakan biaya tidak sedikit dari kebutuhan

rumah tangga. Menurut hasil wawancara dengan ketua tata usaha SMPN 29 Kota Bandung bahwa dana tersebut mendapat alokasi khusus dari pemerintah Kota Bandung tetapi tidak menggunakan dana BOS. Nama nya bantuan transportasi siswa miskin yang mendapat anggaan khusus dari pemerintah Kota Bandung.

Kegunaan sasaran sudah tepat karena pihak pemerintah kota membuat draft program selama satu tahun jadi pengeluaran yang itu harus sesuai dengan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung, jadi SMP tidak sibuk lagi membuat draft untuk pengeluran setiap bulanya, karena pemerintah kota yang telah membuatnya. Jadi pihak SMPN 29 Kota Bandung hanya mengunakan uang sesuai dengan draft yang telah buat. Kenapa pemerintah membuat kebijakan seperti ini, supaya pengeluaran tidak melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bandung.

4.6.2 WaktuProgram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota BandungDi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 29 Kota Bandung.

Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Definisi tersebut menjelaskan bahwa waktu erat kaitannya dengan proses evaluasi kebijakan program BOS Kota Bandung. Indikator waktu juga merupakan faktor sensitif karena biasanya hal yangs ering terjadi dari suatu program yang diimplementasikan oleh pemerintah terkendala oleh masalah waktu.

Definisi mengenai waktu yang mengarah ke sebuah proses dalam suatu periode tertentu. Bicara mengenai evaluasi kebijakan sangat relevan apabila indikator waktu ini dikaitkan dengan tingkat keberhasilan suatu program yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah. Apalagi pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2009 telah menyelenggarakan program BOS.

Banyak masalah yang ditemui dalam penyelenggaraan program BOS hingga saat ini. Masalah tersebut diantaranya: Waktu penyaluran dana BOS pernah mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal penganggaran yang telah ditentukan pada tahun anggaran terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala TU SMPN 29 Kota Bandung berkenaan dengan pendapat beliau mengenai indikator waktu dalam proses evaluasi penyaluran dana BOS Kota Bandung, yaitu:

> "Waktu sendiri tidak bisa diabaikan begitu saja karena waktu secara langsung berhubungan dengan proses manajemen apabila suatu program besar seperti kebijakan dana BOS maka yang terjadi apabila penyalurannya terhambat oleh waktu maka program tidak berjalan dengan baik. Sehingga program itu dinyatakan gagal" (13 Juni 2013).

Program yang terlambat akan lebih besar pengeluarannya, hal tersebut mengakibatkan kerugian dan penghambur-hamburan dana APBD.Waktupenyaluran tidak sesuai keinginan pemerintah Kota karena terjadi keterlambatan diakibatkan data yang diterima pusat tidak tepat waktu sehingga terkadang mereka harus menggunakan uang sekolah untuk membiayai kebutuhan untuk memenuhi perlengkapan untuk ujian sekolah. Hal ini lah yang harusnya dievaluasi karena hal ini akan membuat pelaksanaan program BOS tidak maksimal dan anggaran yang berlebih untuk sesuatu yang tidak terdaftar dalam RAPBS.

Bukan hanya masalah program dana BOS saja yang menemui kendala dengan waktu. Bahkan tidak jarang program-program yang dirancang dengan

sebaik-baiknya sering terjadi keterlambatan. Inilah masalah besar yang ditemui negara kita, budaya karet masih sangat terasa.

Peneliti terkadang merasa apa yang salah terhadap kinerja pemerintah kita yang begitu panjang birokrasinya. Saat ini sudah ada yang dinamakan reformasi birokrasi dimana pemerintah ingin memperbaiki sistem birokrasi kita dengan tujuan salah satunya yaitu mempersingkat waktu. Namun realitanya reformasi birokrasi sudah diimplementasikan tetapi masih sering ditemukan antara RAPBS dengan realita sering tidak sesuai.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya-sumber daya inilah yang seharusnya dapat mengendalikan waktu dengan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab yang begitu besar. Sehingga tidak ada lagi program yang telah dijadwalkan selalu terkendala dengan waktu.

Terlebih lagi jika program tersebut mencakup skala kotamadya dimana kotamadya terdiri dari beberapa kelurahan, desa-desa, kecamatan-kecamatan dimana fokusnya bukan hanya puluhan kepala keluarga atau ratusan masyarakat tetapi bisa mencapai ratusan ribu masyarakat. Itu artinya anggaran yang dikeluarkan begitu besar. Apabila masalah keterlambatan selalu menjadi fokus utama proses evaluasi kebijakan maka dapat disimpulkan berapa puluh persen kerugian yang dialami Pemerintah Kota Bandung hanya karena faktor waktu yang seharusnya dapat dikendalikan oleh sumber daya-sumber daya yang berkompeten.

Walaupun pernah mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana BOS yang dialami SMPN 29, hal tersebut tidak terjadi lagi. Sejauh ini keterlambatan penyaluran dana BOS pernah dialami namun saat ini hal tersebut tidak terjadi lagi dan menjadi perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Bahan evaluasi untuk indikator waktu ini yaitu saat terjadi keterlambatan dampaknya yaitu pengeluaran biaya yang diambil dari APBD. Pemerintah Kota Bandung akan mengalami kerugian apabila kebijakan suatu program mengalami keterlambatan. Pemerintah harus memiliki alternati-alternatif solusi dari pengalaman yang sudah ada. Apabila di tahun sebelumnya keterlambatan itu pernah terjadi seharusnya di tahun berikutnya pemerintah langsung mengevaluasi dan mencari solusi terbaik sehingga apabila dalam hal penyaluran dana BOS pemerintah mengalami masalah yang sama bisa segera di atasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TU SMPN 29 Kota Bandung, saat terjadi keterlambatan bukan hanya pemerintah saja yang rugi tetapi sekolah turut dirugikan karena apabila terjadi keterlambatan pemberian dana BOS ke sekolah-sekolah maka sekolah tersebut harus mengeluarkan dana talangan yang berasal dari kas sekolah.

Kesimpulannya bahwa hal tersebut membuat sistem yang dibuat tidak berjalan sesuai dengan yang tertera pada anggaran sekolah dan terganggunya rancangan rencana yang sudah dibuat sekolah karena uang kas sekolah digunakan untuk menggantikan terlebih dahulu dana BOS yang terlambat. Apabila hal tersebut tidak dievaluasi dengan cermat maka yang terjadi kedepannya adalah terhambatnya tujuan dan hanya akan memunculkan permasalahan baru.